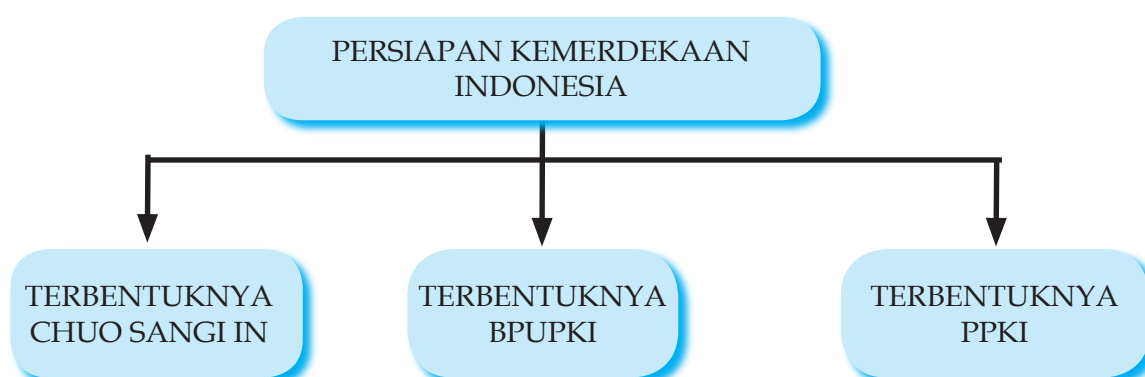


BAB X

PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu memiliki kemampuan untuk menjelaskan persiapan kemerdekaan Indonesia.

PETA KONSEP



Kata Kunci persiapan kemerdekaan

Para siswa, perlu kalian ketahui bahwa sejak tahun 1941 Jepang mengobarkan perang Asia Timur Raya. Perang ini ditandai pengeboman pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour (Hawaii) pada 7 Desember 1941 oleh Angkatan Perang Jepang. Pada awalnya pasukan Jepang banyak mendapatkan kemenangan dalam pertempuran-pertempuran selanjutnya. Namun, di tahun 1942 angkatan perang Jepang mulai terdesak. Untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara jajahan Jepang, pemerintah Jepang kemudian menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada negara-negara jajahannya.

Ternyata situasi pasukan Jepang semakin memburuk pada bulan Juli - Agustus 1944. Hal itu menyebabkan jatuhnya Kabinet Tojo. Sebagai gantinya kemudian diangkat Jenderal Kuniaki Koiso sebagai Perdana Menteri yang memimpin Kabinet Baru (Kabinet Koiso). Salah satu langkah kebijakan yang diambil oleh Koiso di daerah-daerah pendudukan adalah mengeluarkan pernyataan tentang "janji kemerdekaan di kemudian hari". Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso dalam sidang Parlemen Jepang (Teikoku Gikei) ke-85 di Tokyo mengumumkan bahwa, daerah Hindia Timur (Indonesia) diperkenankan merdeka kelak dikemudian hari. Janji ini kemudian direalisasi Jepang dengan membentuk badan-badan untuk mempelajari, mempersiapkan dan melengkapi Indonesia yang akan menjadi negara merdeka.

A. PEMBENTUKAN CHOU SANGI IN

Sebagaimana telah disebutkan, tahun 1942, posisi pasukan tentara Jepang di Pasifik mulai terdesak. Untuk menarik dukungan penduduk di negara jajahan, Jepang merencanakan memberi kemerdekaan kepada Birma dan Filipina. Rencana itu tidak menyebut nasib Indonesia. Oleh karena itu, Ir. Soekarno dan Moh. Hatta mengajukan protes kepada Jepang

Menanggapi protes dan ancaman dan tokoh-tokoh nasionalis di Indonesia, pemerintah Jepang kemudian menempuh kebijaksanaan partisipasi politik. Maksudnya, memberikan peran aktif kepada tokoh-tokoh Indonesia di dalam lembaga pemerintahan. Untuk ini telah diambil langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Pembentukan Dewan Pertimbangan Pusat (*Chuo Sangi In*).
- b. Pembentukan Dewan Pertimbangan Keresidenan (*Shu Shangi Kai*).
- c. Tokoh-tokoh Indonesia diangkat sebagai penasihat di berbagai departemen.
- d. Pengangkatan orang-orang Indonesia ke dalam pemerintahan dan organisasi resmi lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, maka pada tanggal 5 September 1943, *Saiko Shikikan* (Kumaikici Harada) mengeluarkan *Osamu Seirei* No. 36 dan 37 tentang pembentukan *Chuo Sangi In* dan *Chuo Sangi Kai*. Hal yang boleh dibahas atau dirundingkan dalam *Chuo Shangi In* antara lain :

- a. pengembangan pemerintahan militer
- b. mempertinggi derajat rakyat
- c. pendidikan dan penerangan
- d. industri dan ekonomi,
- e. kemakmuran dan bantuan sosial, serta
- f. kesehatan.

Pada Sidang *Chuo Sangi In* I, tanggal 17 Oktober 1943 dilantik secara resmi, ketua *Chuo Sangi In*, yakni Soekarno dan dua orang wakil ketua, yakni *R.M.A.A. Kusumo Utoyo* dan *dr. Buntaran Martoatmojo*. Anggota *Chuo Sangi In* boleh mengajukan usul-usul, tetapi semua keputusan tergantung pada pemerintah di Tokyo.

Pada tanggal 15 November 1943, delegasi *Chuo Sangi In* yang terdiri atas Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Bagus Hadikusumo diundang ke Jepang. Pada kesempatan pertemuan dengan PM Tojo, delegasi *Chuo Sangi In* minta agar Indonesia diizinkan mengibarkan bendera Sang Merah Putih dan diizinkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta mendesak agar Indonesia disatukan dalam satu pemerintahan. Permintaan ini ditolak PM. Tojo.

Dalam tahun 1944, Jepang semakin terdesak di dalam Perang Asia Timur Raya. Kemunduran-kemunduran pasukan Jepang dan masalah-masalah lain yang dihadapi menyebabkan jatuhnya kabinet Tojo. Ia kemudian digantikan oleh PM. Koiso pada tanggal 18 Juli 1944.

Pada masa pemerintahan PM Koiso, situasi perang semakin memburuk. Jepang semakin terdesak untuk mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dalam berbagai pertempuran, pada tanggal 7 September 1944, PM Koiso mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia akan

diberi kemerdekaan di kemudian hari. Pernyataan ini kemudian terkenal dengan sebutan *Janji Koiso*.

Dari segi perjuangan untuk segera mencapai kemerdekaan, keberadaan Chuo Sangi In tidak banyak berarti. Akan tetapi adanya badan itu semakin menambah wawasan dan pengalaman-bagi para anggota. Hal ini penting, karena para anggota Chuo Sangi In umumnya adalah para pejuang nasionalis yang bercita-cita mencapai kemerdekaan.

B. BPUPKI

1. Terbentuknya BPUPKI

Jepang benar-benar terancam dalam perangnya melawan sekutu. Untuk semakin menarik simpati bangsa Indonesia agar tetap mendukung Jepang, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Kumaikici Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam bahasa Jepang BPUPKI disebut Dokuritsu Junbi Cosakai.

BPUPKI beranggotakan 60 orang, ditambah beberapa pimpinan. Sebagai ketua adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Wakil-wakil ketua, yakni *Icibangase* yang sekaligus sebagai kepala Badan Perundingan dan *RP. Suroso* yang sekaligus sebagai kepala sekretariat. Sebagai kepala sekretariat, *RP. Suroso* dibantu oleh *Toyohito Masuda* dan *Mr. AG. Pringgodigdo*.

BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945 diresmikan. Pada kesempatan persemian ini dilakukan pengibaran bendera *Hinomaru* disusul pengibaran bendera *Merah Putih*. Hal ini semakin membangkitkan semangat para anggota BPUPKI dalam mempersiapkan upaya Indonesia merdeka. Yang sangat menarik, sejak itu lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan dan Sang Merah Putih boleh dikibarkan.

Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Jika suatu saat kelak meneguhkan kemerdekaannya, maka bangsa Indonesia sudah harus memiliki dasar negara. Oleh karena itu, BPUPKI merumuskan dasar negara.

2. Sidang Sidang BPUPKI

a. Sidang I

Sebagai realisasi pelaksanaan tugas, BPUPKI kemudian mengadakan sidang-sidang. Secara garis besar sidang-sidang BPUPKI itu terbagi menjadi dua kali sidang. Sidang BPUPKI I diadakan pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945. Kemudian Sidang BPUPKI II dilangsungkan pada tanggal 10 - 17 Juli 1945. Sidang-sidang BPUPKI itu untuk merumuskan Undang-Undang Dasar.



Gambar 10.1 Sidang BPUPKI I

Sidang pertama membahas bagi negara Indonesia merdeka. Waktu itu KRT. Rajiman Widyodiningrat meminta pandangan dari para anggota mengenai dasar negara baru yang akan dibentuk. Untuk itu, tampil beberapa tokoh untuk berpidato menyampaikan pandangannya. Dari sekian banyak pembicara, ada tiga tokoh yang paling dipertimbangkan pandangan-pandangannya. Mereka adalah *Mr. Moh Yamin*, *Mr. Supomo*, dan *Ir. Soekarno*.

Pidato Moh. Yamin pada tanggal 29 Mei mengusulkan lima dasar negara kebangsaan Indonesia, yakni sebagai berikut.

- a. Peri Kebangsaan.
- b. Peri Kemanusiaan.
- c. Peri Ketuhanan.
- d. Peri Kerakyatan.
- e. Kesejahteraan Rakyat,

Mr. Supomo dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan dasar-dasar Negara yang diajukan sebagai berikut.

- a. Persatuan.
- b. Kekeluargaan
- c. Keseimbangan lahir dan batin.
- d. Musyawarah.
- e. Keadilan rakyat.

Tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari terakhir dari rangkaian Sidang BPUPKI I. Dalam pidato itu yang istimewa ia mengajukan usul nama, lima asas yang disebut dengan Pancasila. Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945 sering disebut dengan pidato lahirnya Pancasila. Sila-sila yang diusulkan Ir. Soekarno sebagai berikut.

- a. Kebangsaan Indonesia.
- b. Internasionalisme atau perikemanusiaan.
- c. Mufakat atau demokrasi.
- d. Kesejahteraan sosial.
- e. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tanggal 1 Juni 1945 Sidang BPUPKI I berakhir.

Untuk menindaklanjuti usulan-sulan dari sidang, BPUPKI membentuk Panitia kecil yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini dikenal sebagai Panitia Sembilan. Sebagai ketuanya Ir. Soekarno. Anggota-anggotanya adalah Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdulkadir Muzakir, Wakhidd Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Cokrosuyoso. Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan melahirkan rumusan yang terkenal dengan nama *Piagam Jakarta (Jakarta Charter)*. Rumusan tersebut sebagai berikut.

- a. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya.
- b. Dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Persatuan Indonesia.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- e. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Sidang II

Pada tanggal 10 Juli 1945 mulai sidang BPUPKI II. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar (UUD). Panitia Perancang UUD diketuai oleh Ir. Soekarno.

Panitia Perancang membentuk Panitia Kecil untuk merumuskan rancangan UUD dengan segala pasal-pasalnya. Panitia Kecil ini dipimpin oleh Mr. Supomo.

Sebelum membahas rancangan Undang-Undang Dasar, mereka membahas bentuk negara. Setelah diadakan pungutan suara, mayoritas anggota memilih negara kesatuan yang berbentuk republik.

Bahasan berikutnya adalah UUD dan pembukaannya. Pada rapat tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang UUD secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD. Tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari Panitia Perancang UUD. Tiga hal penting yang dilaporkan oleh Ir. Soekarno selaku ketua Panitia Perancang UUD sebagai berikut.

- a. Pernyataan Indonesia merdeka
- b. Pembukaan UUD (diambil dari Piagam Jakarta)
- c. Batang tubuh UUD

Sidang menyetujui tiga hal yang dilaporkan oleh Ir. Soekarno tersebut.

C. PPKI

1. Terbentuknya PPKI

Jepang semakin mengalami kemunduran dalam Perang Asia Timur Raya. Komando Tentara Jepang wilayah Selatan mengadakan rapat. Dalam rapat itu disepakati bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan pada tanggal 7 September 1945.

Keadaan Jepang semakin kritis. Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Menghadap situasi ini, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Persetujuan ini terjadi pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan untuk mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno, sedangkan wakilnya Drs. Moh. Hatta.

PPKI beranggotakan 21 orang dan semuanya orang Indonesia yang berasal dari berbagai daerah.

Jawa	12 wakil.
Sumatera	3 wakil.
Sulawesi	2 wakil.
Kalimantan	1 wakil.
Sunda Kecil	1 wakil.
Maluku	1 wakil.
Golongan penduduk Cina	1 wakil



Gambar 10.2 Sidang PPKI

Untuk kepentingan peresmian dan pelantikan PPKI, Jendral Terauchi, pimpinan Angkatan Perang Jepang yang berkedudukan di Saigon, pada tanggal 9 Agustus 1945 memanggil Soekarno, Moh. Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon. Di Dalat, Jendral Terauchi menegaskan bahwa Pemerintah Kemaharajaan Jepang memutuskan untuk menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

2. PPKI dan Perkembangan Situasi Indonesia

Tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Moh. Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat pulang kembali ke Jakarta. Sementara Jepang sudah dalam keadaan lumpuh sebab tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki juga dibom atom oleh Amerika Serikat. Dengan demikian Jepang benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak Sekutu.

Ketika ketiga perwakilan bangsa Indonesia kembali ke tanah air, keadaan politik di Indonesia telah terjadi perubahan sangat drastis. Para tokoh yang terus mengikuti perkembangan Perang Dunia II mempunyai ide untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, tanpa menunggu keputusan Jepang. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Perbedaan pendapat terjadi antara golongan tua yang terwakili dalam PPKI, dengan golongan muda yang terwakili dalam beberapa perkumpulan. Beberapa perkumpulan yang termasuk golongan muda misalnya:

- Kelompok Asrama Menteng 31 yang dipelopori Chaerul Saleh dan Sukarni
- Kelompok Asrama Indonesia Merdeka yang dipelopori Mr Soebarjo
- Kelompok Asrama Mahasiswa Kedokteran yang mendukung Sjahrir.

Golongan muda mendesak agar Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan. Sementara golongan tua menghendaki proklamasi menunggu perkembangan keputusan Jepang. Alasan golongan tua adalah untuk menghindari pertumpahan darah, mengingat pasukan Jepang masih banyak yang ada di Indonesia.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok. Soekarno dan Hatta didesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, keinginan golongan muda terpenuhi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945

Proklamasi dibacakan Ir Soekarno pukul 10.00 di Jl Pegangsaan Timur Jakarta. Sebagai penandatanganan naskah proklamasi adalah Soekarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Sejak tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan.



Gambar 10.3 Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan

Tugas 10.1

Para siswa, Buatlah kelompok terdiri 3 sampai 5 orang secara bebas. Tugas kalian membuat perbandingan peranan Chuo Sangi In, BPUPKI dan PPKI terhadap persiapan kemerdekaan Indonesia

Rangkuman

Angkatan perang Jepang mengalami kemunduran dalam berbagai front pertempuran. Untuk menarik simpati rakyat di daerah pendudukan agar membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang mengeluarkan pernyataan tentang “janji kemerdekaan di kemudian hari”. Janji ini kemudian direalisasi Jepang dengan membentuk badan-badan untuk mempelajari, mempersiapkan dan melengkapi kemerdekaan Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, maka pada tanggal 5 September 1943, Saiko Shikikan (Kumaikici Harada) mengeluarkan Osamu Seirei No. 36 dan 37 tentang pembentukan Chuo Sangi In dan Chuo Sangi Kai. Pada Sidang Chuo Sangi In I, tanggal 17 Oktober 1943 dilantik secara resmi, ketua Chuo Sangi In, yakni Soekarno dan dua orang wakil ketua, yakni R.M.A.A. Kusumo Utoyo dan dr. Buntaran Martoatmojo.

Dari segi perjuangan untuk segera mencapai kemerdekaan, keberadaan Chuo Sangi In tidak banyak berarti. Akan tetapi adanya badan itu semakin menambah wawasan dan pengalaman-bagi para anggota. Hal ini penting, karena para anggota Chuo Sangi In umumnya adalah para pejuang nasionalis yang bercita-cita mencapai kemerdekaan.

Jepang benar-benar terancam dalam perangnya melawan sekutu. Untuk semakin menarik simpati bangsa Indonesia agar tetap mendukung Jepang, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Kumaikici Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai.

Sebagai ketua adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Wakil-wakil ketua, yakni Icibangase yang sekaligus sebagai kepala Badan Perundingan dan RP. Suroso yang sekaligus sebagai kepala sekretariat. Sebagai kepala sekretariat, RP. Suroso dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. AG. Pringgodigdo. BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945 diresmikan.

Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Jika suatu saat kelak meneguhkan kemerdekaannya, maka bangsa Indonesia sudah harus memiliki dasar negara. Oleh karena itu, BPUPKI merumuskan dasar negara. Pada rapat tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang UUD secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD.

Keadaan Jepang semakin kritis. Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Menghadap situasi ini, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Persetujuan ini terjadi pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan untuk mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno, sedangkan wakilnya Drs. Moh. Hatta.

Untuk kepentingan peresmian dan pelantikan PPKI, Jendral Terauchi, pimpinan Angkatan Perang Jepang yang berkedudukan di Saigon, pada tanggal 9 Agustus 1945 memanggil Soekarno, Moh. Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon. Di Dalat, Jendral Terauchi menegaskan bahwa Pemerintah Kemaharajaan Jepang memutuskan untuk menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

Latihan

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat di antara pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Akhir tahun 1942, posisi pasukan tentara Jepang di Pasifik mulai terdesak. Untuk menarik dukungan penduduk setempat, maka Jepang merencanakan memberi kemerdekaan kepada ...
 - a. Birma dan Filipina.
 - b. Indonesia dan Filipina
 - c. Indonesia dan Malaysia
 - d. Indonesia dan Birma
2. Pada tanggal 5 September 1943, *Saiko Shikikan* (Kumaikici Harada) mengeluarkan *Osamu Seirei* No. 36 dan 37 tentang pembentukan *Chuo Sangi In* dan *Chuo Sangi Kai*. Hal yang boleh dibahas atau dirundingkan dalam *Chuo Shangi In* antara lain :
 - a. pengembangan pemerintahan militer
 - b. kemerdekaan Indonesia
 - c. pemerintahan Indonesia
 - d. calon para pemimpin Indonesia
3. Dari segi perjuangan untuk segera mencapai kemerdekaan, keberadaan *Chuo Sangi In* tidak banyak berarti, namun badan ini memiliki peran
 - a. badan itu semakin menambah wawasan dan pengalaman-bagi para anggota.
 - b. Badan ini menjadi awal lahirnya Indonesia merdeka
 - c. Badan ini menjembatani hubungan antara Indonesia dengan Jepang
 - d. Badan ini menyiapkan Indonesia merdeka
4. Yang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai, pada tanggal 1 Maret 1945 adalah

- a. Kumaikici Harada
 - b. PM Tojo
 - c. PM Kaisei
 - d. Kaisar Hirohito
5. Yang menjadi ketua BPUPKI adalah
- a. Dr. Rajiman Widyodiningrat
 - b. Ir Sukarno
 - c. Moh Hatta
 - d. RP. Suroso
6. BPUPKI beranggotakan
- a. 60 orang
 - b. 40 orang
 - c. 30 orang
 - d. 20 orang
7. BPUPKI diresmikan pada tanggal
- a. tanggal 28 Mei 1945
 - b. tanggal 27 Mei 1945
 - c. tanggal 26 Mei 1945
 - d. tanggal 25 Mei 1945
8. Sebagai realisasi pelaksanaan tugas, BPUPKI kemudian mengadakan sidang-sidang. Secara garis besar sidang-sidang BPUPKI itu terbagi menjadi dua kali sidang. Sidang BPUPKI I diadakan pada tanggal
- a. 29 Mei - 1 Juni 1945
 - b. 28 Mei - 1 Juni 1945
 - c. 30 Mei - 1 Juni 1945
 - d. 27 Mei - 1 Juni 1945.
9. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang
- a. dasar bagi negara Indonesia merdeka
 - b. pembukaan UUD 1945
 - c. Batang tubuh UUD 1945
 - d. Proklamasi kemerdekaan Indonesia
10. Yang mengajukan usul nama, lima asas disebut dengan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 adalah
- a. Ir. Soekarno
 - b. Moh Yamin
 - c. Mr Supomo
 - d. Moh Hatta.

B. Jawablah dengan singkat

1. Sebutkan peranan Chuo Sangi In dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia
2. jelaskan maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI

3. Jelaskan hasil sidang II BPUPKI
4. Jelaskan peranan PPKI dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia
5. jelaskan mengenai Piagam Jakarta.

C. Isilah titik titik di bawah ini

1. Yang menjadi ketua Chuo Sangi In adalah.....
2. Setelah Kabinet Tojo jatuh, pemerintahan Jepang digantikan oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri
3. Pernyataan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan di kemudian hari disampaikan oleh Perdana Menteri
4. BPUPKI diresmikan pada tanggal
5. sidang BPUPKI II diadakan pada tanggal

Refleksi

Para siswa, para tokoh kejuangan telah memberikan teladan bagaimana mereka berjuang dengan cara-cara masing-masing untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teladanilah nilai nilai kerjuangan dari para tokoh pejuang dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.